

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-13/BC/2024

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE KOREA
CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) telah ditandatangani Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Korea Customs Service of The Republic Of Korea*;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditandatangani Catatan Penjelasan (*Explanatory Notes*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Korea Customs Service of The Republic Of Korea*;
 - c. bahwa telah dilakukan uji coba pelaksanaan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Korea Customs Service of The Republic Of Korea*;
 - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kedua belah pihak bersepakat untuk menerapkan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat secara penuh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Korea Customs Service of The Republic Of Korea*, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *The Korea Customs Service of The Republic Of Korea*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 987);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE KOREA CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA*.

KESATU : Menerapkan secara penuh klausul-klausul sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator*) dan Catatan Penjelasan (*Explanatory Notes*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan *The Korea Customs Service of The Republic Of Korea* (KCS) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penerapan klausul-klausul dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat dan Catatan Penjelasannya antara DJBC dengan KCS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, khususnya mengenai pemberian fasilitas perdagangan melalui percepatan proses *customs clearance* berupa penurunan tingkat risiko sebesar 20% pada *risk engine* reguler dalam manajemen risiko penjaluran impor.

KETIGA : Fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan dengan ketentuan:

- barang impor berasal dari pelabuhan muat di Republik Korea;
- menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan nomor identifikasi AEO (*AEO Trader Identification Number*) dan tanggal otorisasi (*authorization date*) perusahaan AEO Korea; dan
- merupakan barang impor untuk dipakai dengan pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.

KEEMPAT : Memerintahkan Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis

Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehubungan dengan penerapan secara penuh (*mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-75/BC/2022 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator*) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *Korea Customs Service*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2024.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

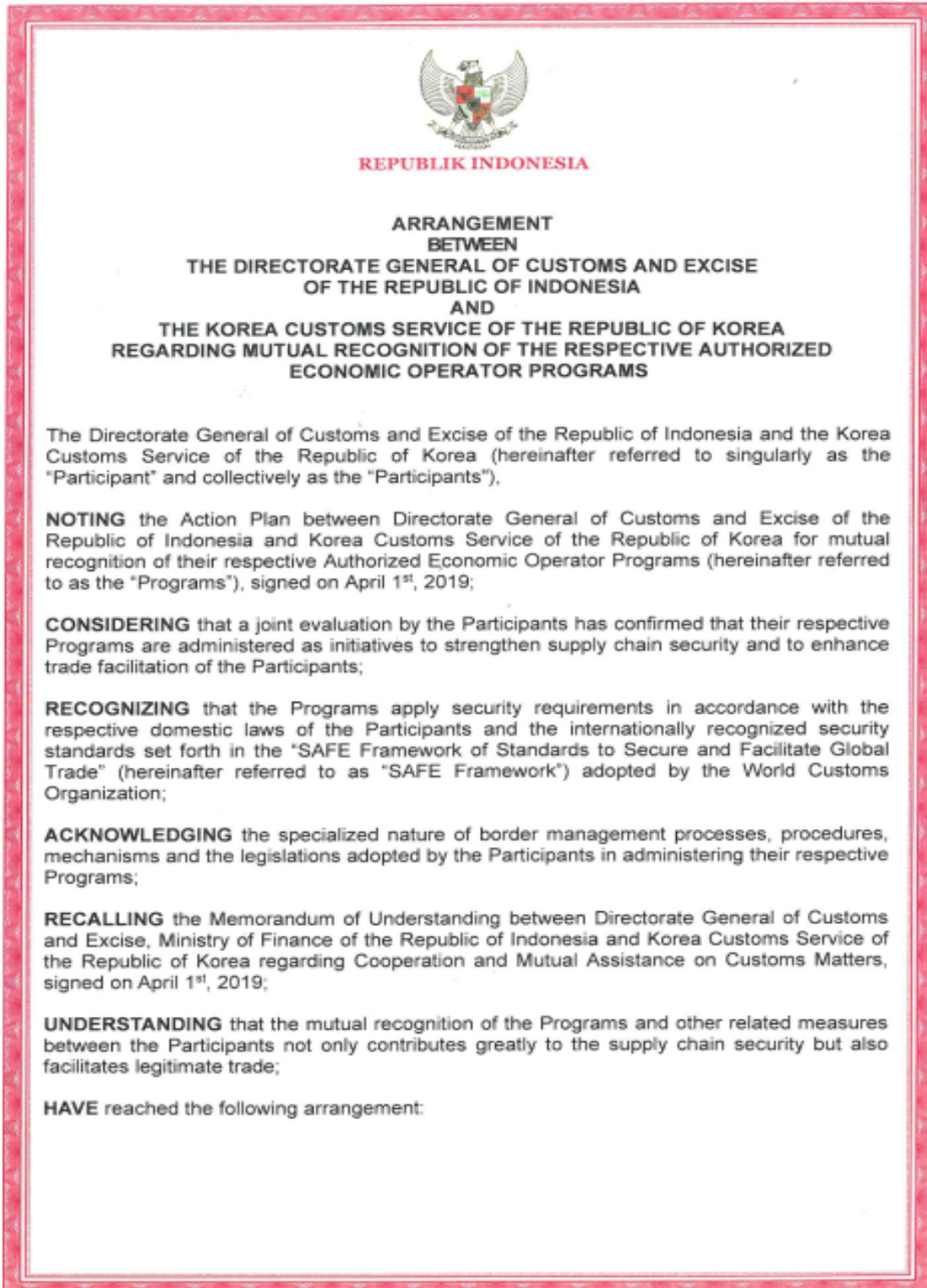


Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2024
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE KOREA
CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA

- A. *KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE KOREA CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA.*



**Paragraph 1
Responsible Participants and Scope**

1. The Participants will be the responsible entities for the implementation of this Arrangement.
2. This Arrangement will exclusively be concerned with the mutual recognition of the respective Programs administered by the Participants.

**Paragraph 2
Compatibility**

1. The Participants will ensure that the standards applied to the respective Programs will be compatible in the following aspects:
 - a. accreditation criteria;
 - b. application procedures;
 - c. validation processes;
 - d. authorization mechanism; and
 - e. monitoring and evaluation mechanism
2. The Participants will ensure that their respective Programs will operate in accordance with the principles and standards of the SAFE Framework.

**Paragraph 3
Mutual Recognition and Benefits**

1. Each Participant intends to accept the validation results and authorization status granted to Authorized Economic Operators (hereinafter referred to as "AEOs") of the other Participant's Program.
2. Each Participant agrees to provide the AEOs, duly accredited by the other Participant under its Program, mainly to expedite the shipment process, with the following trade facilitation measures:
 - a. reduced import inspection rates;
 - b. simplified verification of import-related documents;
 - c. faster clearance of import cargo;
 - d. prioritized measures to respond to disruptions in trade flows due to increases in security alert levels, border closures and/or natural disasters, hazardous emergencies or other major incidents; and
 - e. designated customs officials in charge of communication in order to handle issues relating to clearance of goods of AEOs under the respective Programs.
3. Each Participant will take into consideration the authorization status of AEOs accorded by the other Participant under its Program when conducting risk assessment on importing goods from those AEOs.
4. Each Participant may, under reasonable circumstances, suspend any or all the facilitation measures given to one or more AEOs of the other Participant, provided that the other Participant has been promptly notified of this decision and the underlying reasons.

5. Each Participant intends to maintain the ability to revoke membership in respective program procedures. The fact of the revocation by the Participant of a member whose status has been accepted by the other Participant should be promptly notified to the other Participant.

**Paragraph 4
Information Exchange and Communication**

1. The Participants will agree upon information exchange and mutual communication as follows:
 - a. regularly exchanging up-to-date information on authorized companies under their respective Programs in a mutually determined manner; such information will include the names, addresses, unique identifiers, authorization status, and other relevant information;
 - b. providing updates on the operation of and changes to their respective Programs; and
 - c. exchanging information obtained from authorized companies regarding the implementation of this Arrangement.
2. The Participants will abide by their respective domestic laws and regulations to exchange information.
3. The Participants will keep the information received from the other Participant confidential, and the information will be used solely for the purpose of implementing this Arrangement, provided that the received information may be disclosed to a third party only with the written consent of the other Participant.

**Paragraph 5
Future Endeavors**

The Participants agree to:

- a. actively implement this Arrangement with a view to strengthening the supply chain security of the Participants and enhancing their common interest on trade facilitation, including to conduct periodic review meetings and joint site validations in order to maintain quality of AEO standards and this Arrangement;
- b. share details of benefits provided to the AEOs of the other Participant in implementing this Arrangement between the Participants;
- c. pursue providing the AEOs of the other Participant with further trade facilitation measures in accordance with this Arrangement; and
- d. share the updates on the changing benefits and/or trade facilitations which might be received by the AEOs between the Participants.

**Paragraph 6
Consultation and Amendment**

1. All issues relating to the interpretation or implementation of this Arrangement will be resolved through mutual consultation of the Participants.
2. Amendment of this Arrangement will be subject to written agreement between the Participants.

**Paragraph 7
Status of Arrangement**

1. This Arrangement does not intend to create any legal rights and obligations binding under international law or the law of any other jurisdiction, nor does it confer or create any rights, privileges or benefits on any third person or party.
2. The Participants will implement the measures under this Arrangement in accordance with their respective domestic laws and regulations and the applicable international agreements.
3. No provision in this Arrangement will restrict either Participant from acting in accordance with the provisions of the applicable international agreements, or its domestic laws, regulations and practices.

**Paragraph 8
Commencement and Termination**

1. This Arrangement will come into effect upon signature by the Participants, provided that Paragraph 3(2) will come into effect within 6 months after the signing of the Arrangement.
2. Either Participant may discontinue or terminate this Arrangement by providing the other Participant with a written notification at least thirty (30) days in advance of the intended date of discontinuation or termination.

Signed in Seoul, Korea on February 6th, 2020 in two originals in the English, Bahasa Indonesia and Korean languages, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

**For the Directorate General of
Customs and Excise of the Republic
of Indonesia**



**Heru Pambudi
Director General**

**For the Korea Customs Service
of the Republic of Korea**



**ROH, Suk Hwan
Commissioner**

- B. CATATAN PENJELASAN (*EXPLANATORY NOTES*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN *THE KOREA CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA*.

**EXPLANATORY NOTES FOR THE ARRANGEMENT
BETWEEN
THE KOREA CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA
AND
THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGARDING
MUTUAL RECOGNITION OF THE RESPECTIVE
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR PROGRAMS**

1. Background and Purpose

The purpose of this Explanatory Notes is to facilitate the implementation of the Arrangement between the Korea Customs Service (hereinafter referred to as "KCS") of the Republic of Korea and The Directorate General of Customs and Excise (hereinafter referred to as "DGCE") of the Republic of Indonesia (and hereinafter referred to separately as "Party" and jointly as "Parties") regarding Mutual Recognition of the respective Authorized Economic Operator Programs and to clarify details of articles of the Arrangement which was signed on February 6th, 2020 in Korea.

2. Information Exchange

To ensure an effective implementation of the Arrangement, both Parties exchange updated information of Authorized Economic Operators (AEOs) in the following manner.

2.1 Details of Information

Both Parties provide the following information in an MS Excel format:

- (a) Identification code (the unique number given to an AEO in order to provide facilitation measures under the Arrangement);
- (b) Name of AEO;
- (c) Address (including all premises);
- (d) Authorization date;
- (e) Validity period;
- (f) Status (marking those valid in black, and marking those that are suspended, canceled or changed in red.)
- (g) Remarks (record major changes for information of the other Party); and
- (h) Entity type.

2.2 Frequency and Channel for Information Exchange

Each Party, according to the Arrangement, provides information as referred to paragraph 2.1 to the other Party via the latter's designated electronic mailbox at the first working day of each month, or whenever there are any changes to the information. If the information for the current month is the same as that of last month, a "No change" message should be sent to the other Party.

2.3 Protection of Information

To enhance security of the AEO information, each Party encodes the AEO list with a password before sending it to the other Party. The password should be 10 digits or more, containing capital and small letters and numbers, without any pattern. Each Party could send the password to the designated electronic mailbox of the other Party when an acknowledgement is received from the same within 24 hours after sending the list.

3. Identification of AEOs of the other Party

To ensure trade facilitation measures are provided under the Arrangement, each Party should promptly and effectively identify whether goods are imported from AEOs of the other Party.

3.1 Korea to Identify Indonesian AEOs

An Indonesian AEO should notify its AEO identification code to its Korean importer when exporting to Korea. Its Korean importer should obtain Overseas Business Partners Code (OBPC) consisting of two digits of national code, six digits of company name, four digits of serial number and one digit of confirmation number, which is linked to the identification number.

The Korean importer should state the above-mentioned OBPC while performing import declaration.

KCS compares such OBPC with the information provided in accordance with paragraph 2; and, thereafter, if the two are matched, the KCS provides trade facilitation measures.

3.2 Indonesia to Identify Korean AEOs

A Korean AEO should notify its identification code to its Indonesian importer when exporting to Indonesia. The Indonesian importer should state the Korean AEO identification code while performing import declaration.

DGCE compares such identification code with the information provided, which has been recorded in Customs & Excise Information System and Automation, in accordance with

paragraph 2; and, thereafter, if the two are matched, the DGCE provides trade facilitation measures.

4. Details of Trade Facilitation Measures

- (a) *Reduced customs import inspection rates:* Each Party recognizes the AEO status of exporters of the other Party at the stage of import declaration, and reduces the rate of inspection for the goods concerned during risk assessment by the Customs.
- (b) *Simplified verification of import-related documents:* Each Party simplifies clearance procedures to importing goods of AEOs of the other Party, and handles documentary validation for import clearance at the same level with that of domestic authorized companies.
- (c) *Faster clearance of import cargo:* Each Party guarantees prioritized clearance in terms of inspection or documentary validation for importing goods of AEOs of the other Party.
- (d) *Prioritized measures:* Each Party responds to disruptions in trade flow due to increases in security alert levels, border closures and/or natural disasters, hazardous emergencies or other major incidents.
- (e) *Designated customs officials:* Each Party appoints one or more customs liaison officers from its headquarters. When an AEO of one Party reports any problem raised during import clearance in the territory of the other Party, the liaison officer who receives the report notifies it to the liaison officer of the other Party. The liaison officer of the importing country does its best to resolve the problem, and informs the other Party of the results.

5. Suspension and Exclusion of Trade Facilitation Measures

5.1 Reasonable Grounds for Suspension and Exclusion

Each Party has the discretion, under reasonable grounds, to suspend or to exclude provisions of trade facilitation measures to AEOs of the other Party taking into consideration its domestic regulations and measures including but not limited to cargo clearance, risk assessment of local companies and intelligence.

Reasonable grounds to suspend or to exclude trade facilitation measures provided to AEOs of the other Party under the Arrangement may include:

- (a) information of AEOs of the other Party being misused or abused; or
- (b) any illegal activities conducted by AEOs of the other Party being detected.

5.2 Procedures for Suspension and Exclusion

In suspending or excluding trade facilitation measures provided to an AEO of the other Party, each Party should promptly notify the other Party of the name of the AEO, the underlying reasons and the date of suspension.

5.3 Resumption of Trade Facilitation Measures

Each Party resumes providing trade facilitation measures to the suspended AEOs under the Arrangement immediately after the grounds for the suspension are no longer valid. Each Party should promptly notify the resumption to the other Party.

In case the approval status of the suspended AEO is revoked, the other Party should be promptly notified in accordance with the information exchange mechanism under paragraph 2.

6. Check and Assessment of Implementing the Arrangement

Both Parties exchange statistics data related to the trade facilitation measures under the Arrangement on a six-monthly basis via e-mail or at a review meeting, and the types of exchanged statistics are as follows:

- (a) the number of importation and the inspection rate of imported cargo from AEOs and non-AEOs of the other Party;
- (b) the actual number of AEOs which have utilized MRA
- (c) clearance lead time of AEOs and non-AEOs.

Both Parties shall hold an implementation review meeting on an annual basis to assess whether the Arrangement is well implemented, and the meeting shall be hosted alternately by both Parties.

7. Pilot Implementation

Prior to commencement of the Arrangement, both Parties shall jointly conduct a pilot implementation to test the related mechanism for exchange of information and address any problems in advance which may possibly occur upon implementation of the Arrangement.

The pilot implementation shall last for a period of two months followed by a one-month review period on the basis of the results and statistics of the pilot implementation.

8. Commencement and Modification

This Explanatory Notes shall come into effect upon signature. All issues relating to the interpretation of this Explanatory Notes shall be resolved through mutual consultation by both Parties.

Modification of this Explanatory Notes, where necessary, may be discussed in the review meeting in accordance with paragraph 6.

Signed in duplicate in the English language.

**FOR
THE KOREA CUSTOMS SERVICE
OF THE REPUBLIC OF KOREA**

Seokmoon, Lee

**SEOK-MOON LEE
DIRECTOR GENERAL OF
AUDIT AND REVENUE BUREAU**

**FOR
THE DIRECTORATE GENERAL OF
CUSTOMS AND EXCISE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**



**R. SYARIF HIDAYAT
DIRECTOR OF INTERNATIONAL
CUSTOMS AND PUBLIC AFFAIRS**

1 July 2021.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2024
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE KOREA
CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) *KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE KOREA CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA (KCS)*

1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
 - a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Korea dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari pihak KCS, selanjutnya:
 - 1) Menyampaikan daftar perusahaan AEO KCS dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Direktur Teknis Kepabeanan dengan cara:
 - a) manual, dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodasi form daftar perusahaan AEO Korea dan perubahannya atau mengalami gangguan; atau
 - b) memutakhirkan daftar perusahaan AEO Korea dan perubahannya pada sistem komputer pelayanan, dalam hal sistem komputer pelayanan telah mengakomodasi form daftar perusahaan AEO Korea dan perubahannya; dan/atau
 - 2) Menyampaikan informasi berupa *update* program AEO dan informasi terkait lainnya dari pihak KCS kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Direktur Teknis Kepabeanan;
 - b. Menerima informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi atau informasi lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Teknis Kepabeanan, selanjutnya menyampaikan kepada pihak KCS;
 - c. Menyiapkan mekanisme komunikasi antara DJBC dengan pihak KCS;
 - d. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
 - e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

- a. Dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodasi form daftar perusahaan AEO Korea dan perubahannya atau mengalami gangguan, menerima informasi Perusahaan AEO Korea dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, selanjutnya melakukan pemutakhiran data pada sistem komputer pelayanan;
 - b. Memutakhirkan Sistem Analisis Risiko Importasi dalam rangka pemberian fasilitas perdagangan pada Sistem Komputer Pelayanan;
 - c. Menyiapkan dan memastikan fasilitas perdagangan dapat diterapkan pada sistem komputer pelayanan;
 - d. Menyediakan informasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan;
 - e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan; dan/atau
 - f. Memberikan bimbingan teknis.
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan
- a. Menerima informasi perusahaan AEO Korea dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis; dan/atau
 - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
4. Direktur Teknis Kepabeanan
- a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Korea dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis;
 - b. Menerima masukan dan melakukan evaluasi dalam rangka pelaksanaan penerapan secara penuh Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator*) dengan pihak KCS .
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi dan/atau informasi lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya kepada Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai; dan/atau
 - d. Memberikan bimbingan teknis;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- a. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
 - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
6. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

- a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi dan layanan informasi; dan/atau
 - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
- a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi, dan layanan informasi; dan/atau
 - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI